



Sepuluh Siswa

• Sambungan Hal 1

Yogyakarta tersebut enggan menjelaskan sekolah mana yang dimaksud. Tetapi, dirinya menegaskan, soal tindak lanjut mengenai pelaksanaan pembelajaran di sana, tidak masuk ranah pemkot. "Karena itu kan seingat SMA, sehingga kewenangannya (Pemda) DIY, kita hanya skrining saja," ungkapnya.

Heroe juga memastikan, di antara 10 sampel kasus positif tersebut, tidak ada yang dikirim menuju laboratorium guna pemeriksaan *Whole Genome Sequencing* (WGS). Sebab, tak ditemui sampel yang berpotensi varian omicron. "Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak ada yang mengarah ke omicron, ya," ucap Wawali.

Di sisi lain, Pemkot Yogyakarta resmi menghentikan proses pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen untuk jenjang SD dan SMP per Rabu (2/2). Perkembangan kasus Covid-19 yang belakangan mengalami lonjakan menjadi pertimbangan utama.

Heroe Poerwadi mengatakan, pihaknya tidak mau mengambil risiko, sehingga PTM dengan kuota penuh yang baru bergulir sekitar dua pekan terpaksa dihentikan. Kuota PTM menjadi 50 persen kembali diberlakukan.

Dengan begitu, skema hybrid, atau gabungan antara daring dan luring menjadi pilihan paling realistis, agar penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah dapat diminimalisasi. Ia pun belum bisa memastikan, sampai kapan PTM 50 persen tersebut harus dijalani

seluruhnya berasal dari satu sekolah.

"Memang di sekolah itu jumlah siswanya banyak, karena sekolahnya besar juga, ya. Sekarang, sudah diarahkan agar isolasi dan segera kita lakukan penelusuran (kontak erat). Semuanya sehat, tanpa gejala berarti," ucap Heroe.

Walau begitu, Wakil Wali Kota seluruhnya berasal dari satu sekolah.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY meminta sekolah jenjang SMA/SMK di DIY untuk melakukan penyesuaian terkait penerapan kebijakan PTM dengan kapasitas 100 persen. Sekolah dengan peserta didik di atas dari 200 siswa, penyelenggaraan PTM dilaksanakan dengan kapasitas 50 persen dari total siswa di sekolah dengan pengaturan *shift/giliran*.

Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya menurutkan, kebijakan itu memperhatikan situasi dan kondisi terkini terkait penularan Covid-19 di daerah. Selain itu, penyebaran Covid-19 sudah terdeteksi di kalangan peserta didik. "Kita buat *shift* siang dan pagi. Jadi tetap setiap hari 100 persen tapi bergantian pelaksanaannya," terang Didik, Rabu (2/2).

Karena menggunakan sistem *shift*, jam pelajaran di kelas kini dipangkas dari 40 menit menjadi sekitar 25-30 menit. Adapun dalam satu hari, terdapat 6 jam mata pelajaran. "Misalnya *shift* pagi jam 07.00 sampai jam 10.30. Kemudian selang 1 jam ada *shift* siang," terangnya. "Ini agar guru tidak terlalu capai juga dalam mengajar tapi ke-terpenuhi siswa mendapat pelajaran bisa dipenuhi. Semua siswa bisa tatap muka tapi bergantian," tambahnya.

Didik menjelaskan, sekolah diperkenankan untuk melaksanakan *blended learning* atau memadukan metode PTM dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ/daring). Penerapan PJJ diharapkan dapat mengisi kekurangan waktu belajar yang dipangkas. "Karena PTM

terbatas untuk mengisi kekurangan waktu tersebut atau pengisian yang dilakukan oleh guru bisa dilakukan jarak jauh," tegasnya.

Kemudian untuk satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik kurang dari 200 orang diperkenankan untuk tetap menyelenggarakan PTM 100 persen. Dengan catatan, sekolah tersebut harus mampu menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

"Yang kurang dari 200 siswa dan memungkinkan untuk melakukan proses di kelas bisa dilakukan dengan *shift* (100 persen), artinya dengan PTM sesuai dengan ketentuan tersebut," paparnya.

Didik mengatakan, kebijakan itu mulai diterapkan keharin. Pihaknya pun telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala sekolah. Kemudian untuk jenjang di bawahnya seperti PAUD, TK, SD, dan SMP juga memberlakukan skema yang sama.

"Kemarin kita sudah koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota juga diberlakukan hal yang sama. Tapi kami belum tahu instruksinya mulai kapan tapi saya kira keharin kesepakatan dimulai hari ini (kemarin)," terangnya.

Sementara itu, Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji menambahkan, kewenangan untuk mengatur kapasitas PTM diserahkan kepada masing-masing sekolah dengan mengacu surat edaran yang diterbitkan Disdikpora DIY.

Sekolah juga diizinkan menggelar PTM dengan kapasitas di bawah 50 persen jika memang tak sanggup menerapkan protokol kesehatan se-

suai dengan ketentuan. "Kita minta supaya ada jaminan terhadap protokol kesehatan. Kalau enggak bisa proses, ya, harus dikurangi. Kalau 50 tidak terjamin prosesnya bisa lebih kecil dari 50," ujarnya.

Menurutnya, Satgas Covid-19 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga akan melakukan pengawasan yang lebih intens terkait penerapan protokol kesehatan di sekolah. "Pemantauannya lebih intensif lagi dibanding hari-hari sebelumnya," tandasnya.

Update kasus

Jumlah orang yang terinfeksi virus Corona di DIY pada Rabu (2/2) dilaporkan bertambah sebanyak 142 kasus. Dengan penambahan itu maka total kasus terkonfirmasi di wilayah ini menjadi 157.744 kasus.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih mengatakan, penambahan kasus baru diperoleh dari hasil *tracing* kontak kasus positif 95 kasus. Distribusi kasus positif adalah Kota Yogyakarta 19 kasus, Bantul 52 kasus, Kulon Progo 12 kasus, Gunungkidul 3 kasus, dan Sleman 56 kasus.

Dia melanjutkan, pasien yang kemarin mengalami kesembuhan dilaporkan penambahan berjumlah 15 kasus. Kasus sembuh dilaporkan di Kota Yogya 6 kasus, Bantul 1 kasus, dan Sleman 8 kasus. "Sehingga total sembuh menjadi 151.805 kasus," jelasnya.

Untuk periode yang sama ada 1 pasien yang dilaporkan meninggal di Gunungkidul akibat virus Corona. Sehingga total kasus meninggal di wilayah ini menjadi sebanyak 5.277 kasus. (akabro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005